

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Akub, Syukri dan Badaru Baharudin, 2012, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Diantha, I Made Pasek, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Dellyana Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta.
- Edi Setiadi & Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Friedman, Lawrence Meir, 2001, *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika (terjemahan Wisnu Basuki)*, Tata Nusa Jakarta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kenedi, John, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, 2020, *Memperjuangkan Keadilan Memulihkan Korban: Catatan LBH Yogyakarta Dalam Advokasi Kasus Kekerasan Seksual*, LBH Yogyakarta, Yogyakarta.
- Maroni, 2015, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, CV Anugrah Utama Raharja (AURA) Anggota IKAPI, Bandar Lampung.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Muda, Ahmad A. K., 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Cet. 1*, Reality Publisher, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Patton, Michael Quinn, 2006, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prasetyo, Ridwan Eko, 2015, *Hukum Acara Pidana*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Raco, J. R., 2010, *Metode Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 1995, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumi, Bandung.
- 2009, *Penegakan Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sihite, Romany, 2007, *Perempuan, Keadilan, Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- , Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso, Moerti Hadiati, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Wanawir, Satriadi, et all, 2012, *Manajemen Pemasaran*, Samudra Biru (Anggota IKAPI), Yogyakarta.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana  
Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi  
Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi terhadap Perempuan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31  
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan  
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

UU Nomor 1 DRT/ Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan  
Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan  
dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Perpres Nomor 2 tahun 1945 tentang Masih Berlakunya Badan-Badan  
Negara dan Peraturan-Peraturan yang ada Sampai Berdirinya  
Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi  
10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan  
Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara  
Republik Indonesia Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman  
Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3  
Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan  
Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan  
dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 2 Tahun 2017 tentang  
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

### **C. Jurnal**

Aji, Muhammad Kharisma Bayu, 2020, “Upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di ranah Publik Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Atmaja, R.M Fajar Harmanto Bayu Kusuma, 2013, “Respon Aparat Penegak Hukum Terhadap Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) dalam Penyelesaian Anak Berhadapan dengan Hukum, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Andi Lulu Isvany, Syahrudin Nawi dan Sri Lestari Poernomo, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur: Studi Di Kepolisian Resor Bone”, *Jurnal of Lex Generalis (JLS)* Volume 3, Nomor 3 Maret 2022.

Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan Vol. 7 Edisi I*.

Baroroh, Hanibarizatul, 2013, “Penegakan Hukum Praktek *Illegal Logging* dan Signifikasinya Bagi Inisiasi Program Redd+ di Kalimantan Tengah”, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Claire Angelique R.I Nolasco, Michae S. Vaughn And Rolando V. De Carmel, 2010, “Toward A New Methodology For Legal Research In Criminal Justice”, *Journal Of Criminal Justice Education*, Volume. 21, No. 1.

Eliza Anggoman, 2019, “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume VIII, Nomor 3.

Ferry Fathurokhman, 2010, “Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Galih Bagas Soesilo, Muh. Alfian, dan Amalia Fadhila Rachmawati, 2021, “Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Moda Transportasi Umum Konvensional”, *Jurnal Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Volume 01, Issue 02.

Henry Arianto, 2010, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Lex Jurnalica* Volume 7 Nomor 2.

Jaka Susila, 2019, “Monodualistik Penanganan Tindak Pidana

Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* IAIN Surakarta, Volume 4, Nomor 2.

Malla, Dwi Syifa Khaerul. 2020, “Tinjauan Maqashid Syari’ah Mengenai Pendampingan Terhadap Korban Tindakan Pelecehan Seksual (Studi Kasus Rifka Annisa Women’s Crisis Center)”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Marcheyla Sumera, 2013, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, *Jurnal Lex et Societis*, Volume 1, Nomor 2.

Rini Maryam, 2012, “Translation Of Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Into The Regulation of Legislation”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 1.

Sudiro, Amad, 1996, “Ruang Lingkup Tindak Pidana Ekonomi di Bidang Perbankan, *Junral Era Hukum* No 9/Th.3/Juli,

#### **D. Internet**

Agus Riwanto, “Modul 1 Konsep Dasar Hukum”, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wpcontent/uploads/pdfmk/SKOM443902-M1.pdf>

Dery Irwansah, 2022, “Sejarah RUU PKS Menjadi UU, Puan: Mari Kita Mulai Peradaban Baru”, *Jawa Pos*, <https://www.jawapos.com/nasional/politik/14/04/2022/sejarah-ruu-tpks-jadi-uu-puan-mari-kita-mulai-perabadan-baru/>

Eddy O.S Hiariej, 2022, “Keunggulan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/04/17/keunggulan-undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual>.

Eko, Ari Wibowo, 2022, “Jokowi Minta RUU TPKS Disahkan, Eks Anggota KPAI: Sinyal Keras ke Partai di DPR”, <https://nasional.tempo.co/read/1546710/jokowi-minta-ruu-tpks-disahkan-eks-anggota-kpai-sinyal-keras-ke-partai-di-dpr/full&view=ok>,

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, <https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/cedaw.pdf>, diakses pada 30 Desember 2021.

Ika Darmika, 2016, “Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum to-ra* Vol 2 No 3,

Jimly Assidique, "Penegakan Hukum", Makalah <https://jimly.com>,

Komnas Perempuan, "15 Bentuk Kekerasan Seksual (Sebuah Pengenalan)", [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf).

Komnas Perempuan, "Infografis 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) yang dikeluarkan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FH UI) dengan tema Ketidakadilan Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan Vol. II", <http://mappifhui.org/2018/11/23/ketidakadilan-gender-kekerasan-terhadap-perempuan-vol-ii/>

Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual (Sebuah Pengenalan)*, [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf).

Komnas Perempuan, Jakarta, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>. Jurnal Perempuan (Untuk Pencerahan dan Kesetaraan), *Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Komnas Perempuan Kasus Terhadap Perempuan Semakin Meningkat*, <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/catatan-tahunan-2019-komnas-perempuan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat>.

Komnas Perempuan, Catatan Akhir Tahun 2020: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021) <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.

Komnas Perempuan, Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Komnas Perempuan, 2019, Korban Berbicara, Data Bicara, *Sahkan RUU Penghapusan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*, Komnas Perempuan, Jakarta, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.

Komnas Perempuan, "Catatan Akhir Tahun 2022: Bayang-Bayang Stagnasi Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan", <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan> diakses pada tanggal 7 Maret 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses pada tanggal 13 Oktober

## **E. Webinar**

Hiariej, Edwar O.S, 2022, “Menggal Lebih Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), Seminar Youth of Indonesia (YOI), LSPR, Jakarta, tanggal 30 Januari 2022.

Indiah Wahyu A, “Refleksi Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2021: Pandemi Dan Ancaman Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak”, Webinar Catatan Akhir Tahun Rifka Annisa, tanggal 20 April 2022.

Ivena Githayoni Mirabel, “Ramu (Ruang Temu) UU TPKS: Harapan dan Tantangan”, *Talkshow*, Departemen MKP Fisipol, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Jaleswari Pramodhawardani, 2022, “Ramu (Ruang Tamu) UU TPKS: Harapan dan Tantangan, Webinar Departemen DMKP Fisipol UGM, Yogyakarta, tanggal 24 Mei 2022.

Jupriyadi, 2022, “Penguatan Karakter Penegak Hukum dan Birokrat Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia”, Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tanggal 15 Februari 2022.

Marsha Maharani, 2022, “Esa Hilang Dua Terbilang Menguji Kolaborasi Payung Hukum Penanganan Kekerasan Seksual Di Indonesia, Talkshow Indonesia Judicial Research Society, Jakarta, 27 Mei 2022.

Pujiono, “Konsultasi Nasional Pembaharuan KUHP 2022 Panel I Tujuan Pembaharuan Hukum Pidana, Seminar yang diadakan oleh Departemen Kriminologi FH UI, Jakarta, 22 Juni 2022.